



**DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



LAPORAN KINERJA 2017

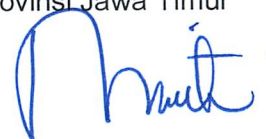
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Peternakan dalam kurun waktu tahun 2017. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan pula pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2017 ini berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja pada tahun 2017 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di tahun-tahun mendatang.

Surabaya, 27 Pebruari 2018
Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Timur



Drh. WEMMI NIAMAWATI, MMA
Pembina Tingkat I
NIP. 19610119 198903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.5 PERAN STRATEGIS DINAS PETERNAKAN.....	6
BAB II. PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019	9
2.1.1 VISI	9
2.1.2 MISI	9
2.1.3 TUJUAN	10
2.1.4 SASARAN STRATEGIS	10
2.1.5 PROGRAM PEMBANGUNAN	11
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN	12
2.4 PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
3.1.1 CAPAIAN KINERJA	13
3.1.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN DAN SOLUSI	16
3.1.3 ANALISA PENGGUNAAN SUMBER DAYA DAN ANGGARAN	18
3.2 REALISASI ANGGARAN	19
3.3 PRESTASI TAHUN 2016	21
BAB IV. PENUTUP	22
4.1 KESIMPULAN.....	22
4.2 REKOMENDASI	23

LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Matrik Renstra 2014-2019
LAMPIRAN II	Perjanjian Kinerja Tahun 2017
LAMPIRAN III	Ringkasan Pengukuran Kinerja Tahun 2017

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan
- Tabel 2.2 : Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran
- Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
- Tabel 2.4 : Rencana Kinerja Tahun 2017
- Tabel 3.1 : Pencapaian Kinerja meningkatnya produksi peternakan Tahun 2017
- Tabel 3.2 : Perbandingan Realisasi Kinerja
- Tabel 3.3 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
- Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Provinsi dengan Realisasi Nasional
- Tabel 3.5 : Pencapaian Kinerja meningkatnya nilai tambah produksi peternakan Tahun 2017
- Tabel 3.6 : Perbandingan Realisasi Kinerja
- Tabel 3.7 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
- Tabel 3.8 : Pencapaian kinerja meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak tahun 2017
- Tabel 3.9 : Perbandingan Realisasi Kinerja
- Tabel 3.10 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD
- Tabel 3.11 : Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
- Tabel 3.12 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
- Tabel 3.13 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Tabel 3.14 : Realisasi Anggaran Tahun 2017

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikannya dalam Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal penting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan demikian Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur diharapkan semakin meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari penggunaan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Kedudukan

Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

b) Tugas

Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan tugas pembantuan.

c) Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- k. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perbibitan, pakan, dan produksi peternakan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perbibitan, Pakan, dan Produksi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis perbibitan, pakan, dan produksi peternakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan yang terdapat pada lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pengawasan mutu benih/bibit ternak dan pakan ternak di lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pengendalian peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dan ke daerah provinsi lain;
 - g. Pengolahan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbibitan, pakan dan produksi peternakan; dan

- I. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Kepala Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan hewan Lainnya, membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan Peternakan
 - b. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan
 - c. Seksi Produksi dan Budidaya Ternak
4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan hewan;
 - b. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas daerah Provinsi;
 - d. Pemberian rekomendasi penerbitan izin kesehatan hewan pada ternak hewan, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi serta telur tetas dari dan ke wilayah Provinsi;
 - e. Pembinaan dan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;
 - f. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan di daerah Provinsi;
 - g. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan hewan;
 - h. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan;
 - i. Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pelaku usaha obat hewan;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
 - k. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
 - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.Kepala Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Kesehatan Hewan
 - b. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - c. Seksi Pengawasan Peredaran Obat Hewan
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesmavet mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;

- c. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi, pengujian dan pengawasan mutu produk hewan;
 - d. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah provinsi, pengawasan praktek hygiene sanitasi dan biosekuriti produsen produk hewan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan tindak karantina lalu lintas produk hewan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk hewan di pos pemeriksaan hewan/produk hewan (*check point*);
 - g. Pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan;
 - h. Pemberian rekomendasi penerbitan izin laboratorium kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi serta pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. Pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit usaha produk hewan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan produk hewan;
 - j. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 - k. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
 - a. Seksi Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk Hewan
 - b. Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan
 - c. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
6. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan/ investasi usaha agribisnis peternakan;
 - d. Pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas peternakan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan harga komoditi peternakan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh peternakan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;

- h. Pelaksanaan pembinaan pengembangan pasar hewan dan pengawasan tataniaga hasil peternakan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil pemasaran hasil peternakan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan membawahi :
- a. Seksi Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Peternakan
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan
 - c. Seksi Investasi Usaha dan Kelembagaan Peternak
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
- a. Medik Veteriner
 - b. Paramedik Veteriner
 - c. Pengawas mutu bibit ternak
 - d. Pengawas mutu pakan ternak
 - e. Instruktur Inseminasi Buatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, terdiri dari :

1. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember
2. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Malang
3. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu
4. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kediri
5. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Magetan
6. UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Tuban
7. UPT Inseminasi Buatan di Surabaya
8. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Tuban
9. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di Malang
10. UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan di Madura

1.5. PERAN STRATEGIS DINAS PETERNAKAN

Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging, telur, dan susu. Protein hewani bermanfaat sebagai sumber energi dalam beraktifitas, pertumbuhan sel dan jaringan serta cadangan energi tubuh. Hingga kini pemenuhan protein hewani tidak dapat digantikan dengan zat yang lain.

Jumlah konsumsi protein hewani selama ini dinilai masih kurang dari nilai konsumsi protein hewani standar Pola Pangan Harapan (PPH). Tingkat konsumsi protein hewani di

Indonesia hanya 4,7 gr/orang/hari. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang rata-rata 10 gr/orang/hari. Dengan demikian usaha peternakan masih berpotensi untuk dikembangkan.

Subsektor Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu mencakup perunggasan (misalnya ayam dan itik), ruminansia kecil (misalnya kambing dan domba) dan ruminansia besar (misalnya sapi dan kerbau). Disamping itu, juga termasuk produk turunannya seperti daging, susu, dan telur.

Subsektor peternakan Provinsi Jawa Timur cukup berpengaruh secara nasional. Populasi sapi potong Jawa Timur mencapai 28 % dari populasi nasional. Sapi potong Jawa Timur diekspor ke beberapa Provinsi lain, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Produksi hasil peternakan Jawa Timur juga menjadi andalan di tingkat nasional. Produksi susu segar di Jawa Timur mencapai 55 % dari total produksi nasional; produksi telur 30 % dari produksi telur nasional; dan produksi daging sapi 19 % dari produksi nasional.

Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal. Undang-undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal tersebut. Karena itu Rumah Potong Hewan juga harus memenuhi standarisasi Nomor Kontrol Veteriner. Saat ini dari 128 RPH Ruminansia di Jawa Timur masih sedikit atau baru 11 RPH yang ber-NKV. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai penerbit NKV sangat berkepentingan agar semua RPH di Jawa Timur dapat memenuhi standar tersebut.

Kendala pembangunan peternakan saat ini adalah kapasitas sumber daya manusia yang terbatas (kebanyakan bukan pekerjaan utama tetapi merupakan pendukung sektor pertanian) dan teknologi. Masyarakat peternak perlu difasilitasi dan dibina dalam upaya meningkatkan kualitas budidaya, pemberian nilai tambah komoditas peternakan, dan diversifikasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk peternakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak. Kendala lain adalah masih banyak beredar produk hasil peternakan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan serta ancaman kematian ternak karena penyakit hewan menular.

Peranan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan antara lain sebagai penyusun kebijakan teknis, pembinaan, dan pengawasan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan dalam rangka mempertahankan Jawa Timur sebagai barometer peternakan nasional antara lain :

1. Penerbitan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 mengenai larangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan kuantitas bibit ternak yang pada akhirnya berpengaruh terhadap populasi.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 524/8838/023/2010 tanggal 30 Juni 2010 mengenai larangan pemasukan dan peredaran sapi, daging, dan jerohan impor sehingga diharapkan tidak ada lagi produk peternakan impor masuk ke Jawa Timur.

3. Surat Edaran Kepala Dinas Peternakan Nomor 524.3/7306/115.02/2012 mengenai pembatasan pengeluaran ternak sapi dari Provinsi Jawa Timur untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran ternak sapi serta pemenuhan kebutuhan ternak untuk masyarakat di Jawa Timur.

BAB II. PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019

Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Pembangunan subsektor peternakan yang tercantum dalam RPJMD Jawa Timur dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas, yaitu : (1) Program Peningkatan Produksi Peternakan; (2) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan; (3) Program Peningkatan Kapasitas Non Aparatur Peternakan. Untuk mendukung program diatas, maka telah ditetapkan visi, misi tujuan/sasaran kebijakan pembangunan peternakan Provinsi Jawa Timur.

2.1.1. VISI

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dirumuskan visi SKPD yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2014 – 2019.

“Terwujudnya agribisnis peternakan Jawa Timur yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.”

2.1.2. MISI

Sejalan dengan visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. *Menjamin pemenuhan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal.*
2. *Mengembangkan produk peternakan unggulan.*
3. *Memperkuat kelembagaan peternak.*

2.1.3. TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatkan produksi peternakan
2. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan
3. Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.

Tabel 2.1 Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menjamin pemenuhan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal.	Meningkatkan produksi peternakan	1. Produksi Daging 2. Produksi Telur 3. Produksi Susu	406.604 ton 391.384 ton 463.464 ton
2	Mengembangkan produk peternakan unggulan	Meningkatkan nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan	30 %
3	Memperkuat kelembagaan peternak	Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	97 kelompok

2.1.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun (2015 – 2019) , dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

Tujuan 1: Meningkatkan produksi peternakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah meningkatnya produksi peternakan

Tujuan 2: Meningkatkan nilai tambah produk peternakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah meningkatnya nilai tambah produk peternakan

Tujuan 3: Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak

Tabel 2.2 Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan produksi peternakan	Meningkatnya produksi peternakan	Produksi daging	368.343 ton	377.551 ton	386.990 ton	396.665 ton	406.604 ton
			Produksi Telur	358.172 ton	368.917 ton	379.984 ton	387.686 ton	391.384 ton
			Produksi Susu	439.425 ton	446.895 ton	454.492 ton	462.219 ton	463.464 ton
2	Meningkatkan nilai tambah produk peternakan	Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan	22%	24%	26%	28%	30%
3	Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	57	65	74	85	97

2.1.5. PROGRAM PEMBANGUNAN

Pembangunan peternakan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan.

Program pembangunan peternakan di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 3 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Produksi Peternakan.

Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk peningkatan produksi hasil ternak *on farm* hingga pemotongannya, menyangkut aspek perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

2. Program Pengembangan Agribisnis.

Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk pemberdayaan peternak agar menghasilkan produk peternakan dan berdaya saing, antara lain pembinaan pasca panen dan bantuan alat pengolahan pasca panen kepada kelompok peternak.

3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan.

Kegiatan-kegiatan pada program ini diarahkan untuk meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani ternak. Kelas kelompok tani ternak terdiri dari pemula, lanjut, madya, dan utama. Dengan adanya kegiatan pembinaan kelembagaan, bimbingan teknis, fasilitasi, dan pemberian bantuan diharapkan dapat meningkatkan kelas kelompok tersebut.

Untuk program rutin perkantoran sebagai pendukung program pembangunan terdiri atas 4 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah pada tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan produksi peternakan	Meningkatnya produksi peternakan	Produksi Daging Produksi Telur Produksi Susu
2	Meningkatkan nilai tambah produk peternakan	Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan
3	Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Renstra yang merupakan penjabaran rencana kinerja lima tahunan selanjutnya diuraikan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Target kinerja RKT menyesuaikan dengan perkembangan kondisi tahunan, sehingga tidak sama dengan Renstra. Rencana Kinerja Tahun 2017 adalah pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya produksi peternakan.	Produksi Daging Produksi Telur Produksi Susu	386.990 ton 379.984 ton 454.492 ton
2.	Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan	26%
3.	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	74 kelompok

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja antara Gubernur dan Kepala Dinas Peternakan dapat dilihat pada lampiran.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur :

Tujuan 1 : Meningkatkan produksi peternakan

Sasaran : Meningkatnya produksi peternakan

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja meningkatnya produksi peternakan Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI*	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi peternakan	1. Produksi Daging	386.990 Ton	437.113 Ton	112,95 %
		2. Produksi Telur	379.984 Ton	512.528 Ton	134,88 %
		3. Produksi Susu	454.492 Ton	507.780 Ton	111,72 %

*) angka sementara

Berdasarkan Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya produksi peternakan menunjukkan produksi daging dapat mencapai target dengan tingkat capaian 112,95%, produksi telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 134,88%, dan produksi susu dapat mencapai target dengan tingkat capaian 111,72%.

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi		Pertumbuhan (%)
				2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya produksi peternakan	1. Produksi Daging	386.990 Ton	424.170 Ton	437.113 Ton	3,05
		2. Produksi Telur	379.984 Ton	509.228 Ton	512.528 Ton	0,64
		3. Produksi Susu	454.492 Ton	496.265 Ton	507.780 Ton	2,32

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa produksi peternakan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan produksi daging mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 3,05%, produksi telur mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 0,64%, dan produksi susu mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 2,32%.

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2019)	REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi peternakan	1. Produksi Daging	406.604 ton	437.113 Ton	107,5%
		2. Produksi Telur	391.384 ton	512.528 Ton	130,95%
		3. Produksi Susu	463.464 ton	507.780 Ton	109,56%

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya produksi peternakan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan produksi daging melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 107,5%, produksi telur melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 130,95%, dan produksi susu melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 109,56%.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Provinsi dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI NASIONAL *	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya produksi peternakan	1. Produksi Daging	437.113 Ton	3.344.206 Ton	13,07
		2. Produksi Telur	512.528 Ton	2.106.872 Ton	24,32
		3. Produksi Susu	507.780 Ton	920.093 Ton	55,18

*) angka sementara, sumber : Kementerian Pertanian

Berdasarkan Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya produksi peternakan Jawa Timur dibandingkan dengan produksi nasional menunjukkan : produksi daging mencapai 13,07% dari produksi nasional, produksi telur mencapai 24,32% dari produksi nasional, dan produksi susu mencapai 55,18% dari produksi nasional.

Tujuan 2 : Meningkatkan nilai tambah produk peternakan

Sasaran : Meningkatnya nilai tambah produk peternakan

Tabel 3.5.
Pencapaian Kinerja meningkatnya nilai tambah produksi peternakan Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI*	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan	26 %	30 %	115 %

*) angka sementara

Berdasarkan tabel 3.5, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya nilai tambah produk peternakan tidak dapat mencapai target dengan tingkat capaian 115%.

Tabel 3.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi		Pertumbuhan (%)
				2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan	26 %	30 %	30%	0

Berdasarkan Tabel 3.6, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya nilai tambah produk peternakan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan rasio nilai tambah tidak mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 0%.

Tabel 3.7.
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2019)	REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan	30 %	30 %	100 %

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya nilai tambah produk peternakan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan rasio nilai tambah produk peternakan mencapai tingkat kemajuan 100%.

Tujuan 3 : Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.

Sasaran : Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak

Tabel 3.8.
Pencapaian kinerja meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	74 kelompok	74 kelompok	100 %

Berdasarkan tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100%.

Tabel 3.9.
Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi		Pertumbuhan (%)
				2016	2017*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	74	65	74	13,85

*) angka sementara

Berdasarkan Tabel 3.9, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok mengalami pertumbuhan sebesar 13,85%.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2019)	REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	97	74	76,28 %

Berdasarkan Tabel 3.11, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok mencapai tingkat kemajuan 76,28%.

3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas, diketahui bahwa ada beberapa indikator kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan.

- a. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan sasaran meningkatnya produksi peternakan antara lain :
 - 1) Produksi daging, produksi telur dan produksi susu meningkat melebihi target karena pada tahun 2017 terjadi peningkatan populasi. Selain itu khusus produksi daging dipengaruhi juga oleh peningkatan permintaan daging ayam baik di dalam wilayah Jawa Timur maupun permintaan dari luar provinsi sehingga pemotongan ternak ayam meningkat untuk memenuhi permintaan daging ayam dari luar provinsi.
- b. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan sasaran meningkatnya nilai tambah produk peternakan antara lain :
 - 1) Bantuan alat pengolahan pasca panen sangat membantu usaha peternakan dalam berproduksi. Keunggulan penggunaan alat adalah dicapainya efisiensi biaya dan mempercepat proses produksi.
- c. Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan sasaran meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak antara lain :
 - 1) Pembinaan kelompok merupakan kerjasama antara berbagai pihak baik Dinas Kabupaten/ Kota, Dinas Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - 2) Adanya lomba-lomba yang rutin diadakan setiap tahun dengan rangsangan hadiah menyebabkan kelompok cukup bersemangat untuk meningkatkan kelas kemampuannya.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah perbaikan kedepan :

- a. Mengembangkan usaha peternakan berbasis kawasan, sehingga dapat fokus pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- b. Memfasilitasi aksesibilitas permodalan untuk mengembangkan usaha ternak, baik melalui koperasi, bank pemerintah, atau lembaga pembiayaan lainnya.
- c. Memberikan penyuluhan good farming practice secara berkala kepada para peternak.
- d. Mendatangkan ternak indukan impor yang berkualitas.
- e. Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolahan pakan skala kecil.
- f. Memberantas wabah penyakit ternak, melalui program pemberian vaksin, ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah penyakit. Disamping itu perlu meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak/ produk ternak.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak dengan cara inseminasi buatan.
- h. Mengadakan alat pengolahan pasca panen bagi usaha peternakan skala kecil.
- i. Kerjasama dengan lembaga penelitian peternakan untuk mengembangkan teknologi peternakan di masyarakat.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tersebut, program yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program peningkatan produksi peternakan.

Hal tersebut dikarenakan :

- a. pelaksana program peningkatan produksi peternakan meliputi sebagian besar kegiatan unit kerja eselon III Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
- b. Keberhasilan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia non aparatur peternakan juga mendukung keberhasilan program peningkatan produksi peternakan. Penerima manfaat program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia non aparatur peternakan adalah kelompok tani subbidang usaha peternakan yang diberdayakan agar mencapai kelas kemampuan kelompok tingkat madya atau utama. Kelas kemampuan kelompok tersebut menerapkan pola beternak yang mengikuti Good Manufacturing Practice dan Good Management Practice, sehingga produktivitas ternak meningkat. Hal ini akan dapat meningkatkan produksi peternakan.

3.1.3. Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.11
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya produksi peternakan	1. Produksi Daging 2. Produksi Telur 3. Produksi Susu	47.093.513.020	48
2.	Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan	500.000.000	0,5
3.	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	3.000.000.000	3,0

Tabel 3.12
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya produksi peternakan	Produksi daging Produksi telur Produksi susu	386.990 ton 379.984 ton 454.492 ton	437.113 Ton 512.528 Ton 507.780 Ton	112,95% 134,86% 111,72%	47.093.513.020	42.773.965.640	90,82%
2.	Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan	26 %	30 %	115,38%	500.000.000	470.128.600	94,02%

3.	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	74	74	100%	3.000.000.000	2.850.711.343	95,02%
----	--	--	----	----	------	---------------	---------------	--------

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya produksi peternakan	Produksi daging Produksi telur Produksi susu	119,84	90,82	29,02
2.	Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan	115,38	94,02	21,36
3.	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	100	95,02	4,98

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 914/103.P/203.2/2017 tanggal 2 Oktober 2017, realisasi anggaran tahun 2017 dirinci pada tabel 3.14.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Tahun 2017

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1					2	3	4	5
1	300	0	0	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.662.352.000	9.719.399.925	145,88
1	300	0	0		BELANJA DAERAH	97.213.137.620	87.357.522.654	89,86
1	300	0	0	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.055.094.600	28.564.556.426	91,98
1	300	0	0	2	BELANJA LANGSUNG	65.158.043.020	58.792.966.228	88,86
1	300	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.048.973.000	3.562.281.050	87,97
1	300	1	19		<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	4.048.973.000	3.562.281.050	87,97
1	300	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.932.281.000	3.509.250.850	89,24
1	300	2	12		<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	2.635.192.000	2.283.151.000	86,64

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1					2	3	4	5
	1	300	2	31	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.297.089.000	1.226.099.850	94,52
	1	300	7		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	4.266.876.000	3.010.538.748	70,55
	1	300	7	1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.111.776.000	2.052.187.698	65,94
	1	300	7	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.155.100.000	958.351.050	82,96
	1	300	8		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	3.316.400.000	2.616.089.997	78,88
	1	300	8	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.052.400.000	795.863.889	75,62
	1	300	8	2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	970.000.000	657.400.856	67,77
	1	300	8	3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	1.294.000.000	1.162.825.252	89,86
	1	300	39		Program peningkatan Produksi Peternakan	47.093.513.020	42.773.965.639	90,82
	1	300	39	1	Pengembangan perwilayahan sumber bibit ternak	1.500.000.000	1.414.303.797	94,28
	1	300	39	2	Pengembangan perbibitan ternak	1.500.000.000	1.273.788.255	84,91
	1	300	39	3	Pengembangan budidaya ternak	1.400.000.000	1.207.302.624	86,23
	1	300	39	4	Pengembangan Lahan Hijauan Pakan	1.000.000.000	858.765.900	85,87
	1	300	39	5	pengembangan alat mesin peternakan	2.750.000.000	2.084.715.465	75,80
	1	300	39	6	pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif	750.000.000	573.326.950	76,44
	1	300	39	7	Pembinaan dan pengawasan mutu pakan	800.000.000	750.733.381	93,84
	1	300	39	8	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	2.750.000.000	2.294.225.313	83,42
	1	300	39	9	Pemberdayaan UPT PT dan HMT Batu	2.250.000.000	2.129.609.633	94,64
	1	300	39	10	Pemberdayaan UPT PT dan HMT Kediri	2.000.000.000	1.985.680.600	99,28
	1	300	39	11	Pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember	2.000.000.000	1.991.663.495	99,58
	1	300	39	12	Pemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban	2.250.000.000	2.186.622.542	97,18
	1	300	39	13	Pemberdayaan UPT PT dan HMT Magetan	2.550.000.000	2.470.686.123	96,88
	1	300	39	14	Pemberdayaan UPT PT dan HMT Malang	2.000.000.000	1.965.556.416	98,27
	1	300	39	15	Pengawasan dan peredaran obat hewan	1.000.000.000	849.997.624	84,99
	1	300	39	16	Pengamatan Penyakit Hewan Menular Strategis	2.500.000.000	2.260.078.805	90,40
	1	300	39	17	Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan	1.500.000.000	1.414.681.057	94,31
	1	300	39	18	pemberdayaan UPT laboratorium Tuban	2.000.000.000	1.899.123.634	94,95
	1	300	39	19	pemberdayaan UPT laboratorium Malang	1.775.000.000	1.677.535.985	94,50
	1	300	39	20	Pemberdayaan Rumah Sakit Hewan	800.000.000	742.490.634	92,81
	1	300	39	21	pengembangan kelembagaan perbibitan ternak	450.000.000	420.488.015	93,44
	1	300	39	22	pengawasan mutu bibit ternak	1.000.000.000	957.074.673	95,70
	1	300	39	23	Penerapan jaminan Keamanan pangan asal hewan	1.000.000.000	975.717.136	97,57
	1	300	39	24	pengawasan lalu lintas dan peredaran produk pangan asal hewan	442.000.000	370.940.100	83,92
	1	300	39	25	Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas dan peredaran Produk Non Pangan Asal	1.150.000.000	1.003.338.580	87,24

Kode Rekening								Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1								2	3	4	5
								<i>Hewan</i>			
1	300	39	26					<i>Pengawasan dan Pengendalian Kesejahteraan Hewan</i>	850.000.000	811.321.188	95,44
1	300	39	27					<i>Pembinaan dan Pengawasan RPH</i>	800.000.000	686.344.136	85,79
1	300	39	28					<i>Pengawasan produk hewan berbasis pengujian laboratorium kesmavet</i>	800.000.000	693.783.190	86,72
1	300	39	29					<i>Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan Madura</i>	3.000.000.000	2.800.847.588	93,36
1	300	39	30					<i>Pembangunan /Renovasi UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesmavet, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya</i>	223.073.300	214.529.000	96,17
1	300	39	34					<i>Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Peternakan</i>	1.000.000.000	775.388.932	77,53
1	300	39	35					<i>Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan Jawa Timur</i>	1.000.000.000	757.182.973	75,72
1	300	39	36					<i>Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat melalui pengembangan budidaya ternak</i>	303.439.720	276.121.895	90,99
1	300	42						<i>Program Pengembangan Agribisnis Peternakan</i>	500.000.000	470.128.600	94,02
1	300	42	141					<i>Pengembangan kualitas pengolahan hasil peternakan</i>	500.000.000	470.128.600	94,02
1	300	45						<i>Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan</i>	3.000.000.000	2.850.711.343	95,02
1	300	45	1					<i>Penguatan kelembagaan peternak</i>	1.000.000.000	945.549.606	94,55
1	300	45	2					<i>pengembangan kapasitas permodalan kelompok peternak</i>	1.000.000.000	983.179.112	98,31
1	300	45	3					<i>Pengembangan informasi pasar dan promosi</i>	1.000.000.000	921.982.625	92,19

3.3. PRESTASI TAHUN 2017

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur senantiasa berkomitmen untuk memajukan pembangunan peternakan di Jawa Timur, dibuktikan dengan aparatur Dinas, kelompok ternak, dan petugas teknis seleksi Provinsi memperoleh prestasi tingkat nasional di tahun 2017, dengan kategori sebagai berikut :

- 10 besar kelompok ternak berprestasi tingkat nasional tahun 2017 komoditas sapi potong;
- 10 besar kelompok ternak berprestasi tingkat nasional tahun 2017 komoditas kambing/domba;

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Produksi Peternakan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya produksi peternakan untuk produksi daging dapat dapat mencapai target dengan tingkat capaian 112,95 %, produksi telur dapat mencapai target dengan tingkat capaian 134,86 %, dan produksi susu dapat mencapai target dengan tingkat capaian 111,72 %.
- b. Sasaran meningkatnya produksi peternakan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan produksi daging mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 3,05%, produksi telur mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 0,64%, dan produksi susu mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 2,32%.
- c. sasaran meningkatnya produksi peternakan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan produksi daging mencapai tingkat kemajuan 107,5%, produksi telur melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 130,95%, dan produksi susu melebihi target RPJMD dengan tingkat kemajuan 109,56%.
- d. sasaran meningkatnya produksi peternakan Jawa Timur dibandingkan dengan produksi nasional menunjukkan produksi daging mencapai 13,07% dari produksi nasional, produksi telur mencapai 24,32% dari produksi nasional, dan produksi susu mencapai 55,18% dari produksi nasional.

Tujuan 2 : Meningkatkan nilai tambah produk peternakan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. sasaran meningkatnya nilai tambah produk peternakan dapat mencapai target dengan tingkat capaian 115,38%.
- b. sasaran meningkatnya nilai tambah produk peternakan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan rasio nilai tambah tidak mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 0%.

- c. sasaran meningkatnya nilai tambah produk peternakan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan rasio nilai tambah produk peternakan mencapai tingkat kemajuan 100%.

Tujuan 3 : Meningkatkan kemampuan kelompok peternak, dapat dijabarkan sebagai berikut

- a. sasaran meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100%.
- b. sasaran meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok mengalami pertumbuhan sebesar 13,85%.
- c. sasaran meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok mencapai tingkat kemajuan 76,28%.

Beberapa masalah dalam pencapaian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Produksi peternakan Jawa Timur dibandingkan dengan produksi nasional menunjukkan produksi daging mencapai 13,07% dari produksi nasional, Hal ini disebabkan masih cukup tingginya prevalensi gangguan reproduksi dan penyakit ternak;
- 2) Nilai tambah produk peternakan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan rasio nilai tambah tidak mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 0%. Hal ini disebabkan masih terbatasnya tingkat kemampuan pengolahan produk peternakan dan promosi produknya;
- 3) Kelas kemampuan kelompok peternak tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok mencapai tingkat kemajuan 76,28%. Hal ini disebabkan cukup banyaknya kelompok yang beralih menjadi badan usaha koperasi atau CV yang dengan demikian kewenangan pembinaan beralih pada Dinas Koperasi dan UMKM.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk meningkatkan kinerja Dinas Peternakan pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan usaha peternakan berbasis kawasan, sehingga dapat fokus pengembangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- 2) Memfasilitasi aksesibilitas permodalan untuk mengembangkan usaha ternak, baik melalui koperasi, bank pemerintah, atau lembaga pembiayaan lainnya.
- 3) Memberikan penyuluhan good farming practice secara berkala kepada para peternak.
- 4) Mendatangkan ternak indukan impor yang berkualitas.
- 5) Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah pakan skala kecil.

- 6) Memberantas wabah penyakit ternak, melalui program pemberian vaksin, ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit wabah penyakit. Disamping itu perlu meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak/ produk ternak.
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak dengan cara inseminasi buatan.
- 8) Mengadakan alat pengolah pasca panen bagi usaha peternakan skala kecil.
- 9) Kerjasama dengan lembaga penelitian peternakan untuk mengembangkan teknologi peternakan di masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2017 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

**MATRIK RENSTRA
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2014 - 2019**

- 1. VISI** : Terwujudnya agribisnis peternakan Jawa Timur yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal
- 2. MISI** : 1. Menjamin pemenuhan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal.
2. Mengembangkan produk peternakan unggulan.
3. Memperkuat kelembagaan peternak.
- 3. TUJUAN** : 1. Meningkatkan produksi peternakan
2. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan
3. Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.
- 4. TUGAS** : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan.
- 5. FUNGSI** : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tujuan 1 : Meningkatkan produksi peternakan

Indikator Kinerja Tujuan

No	Indikator	Definisi	Kondisi awal (2013)	Kondisi akhir (2019)
1	- Produksi Daging - Produksi Telur - Produksi Susu	Jumlah produksi peternakan daging, telur, dan susu dalam periode tertentu dengan satuan ton.	350.613 ton 340.232 ton 416.418 ton	406.604 ton 391.384 ton 463.464 ton

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN						PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2013	2014 (transisi)	2015	2016	2017	2018	2019		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya produksi peternakan	- Produksi daging - Produksi susu - Produksi telur	Jumlah produksi peternakan daging, telur, dan susu dalam periode tertentu dengan satuan ton.	350.613 ton 340.232 ton 416.418 ton	359.378 347.717 423.914	368.343 358.172 439.425	377.551 368.917 446.895	386.990 379.984 454.492	396.665 387.686 462.219	406.604 ton 391.384 463.464 ton	1. Program Peningkatan Produksi Peternakan	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Tujuan 2 : Meningkatkan nilai tambah produk peternakan

Indikator Kinerja :
Tujuan

No	Indikator	Definisi	Kondisi awal (2013)	Kondisi akhir (2019)
1	Rasio nilai tambah produk peternakan	<p>Nilai tambah adalah selisih antara nilai jual produk (output) dengan nilai input bahan baku. Produk peternakan yang dihitung adalah produk olahan daging sapi yang dihasilkan oleh usaha peternakan yang memperoleh pembinaan dari Provinsi.</p> $\text{Rasio NT} = \frac{\text{Nilai tambah}}{\text{Nilai output}} \times 100\%$	20%	30%

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUNAN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2014 (transisi) Target	2015 Target	2016 Target	2017 Target	2018 Target	2019 Target		
1.	Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	Rasio nilai tambah produk peternakan	<p>Nilai tambah adalah selisih antara nilai jual produk (output) dengan nilai input bahan baku. Produk peternakan yang dihitung adalah produk olahan daging sapi yang dihasilkan oleh usaha peternakan yang memperoleh pembinaan dari Provinsi.</p> $\text{Rasio NT} = \frac{\text{Nilai tambah}}{\text{Nilai output}} \times 100\%$	20%	20	22	24	26	28	30	1. Program pengembangan agribisnis peternakan	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Tujuan 3 : Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.

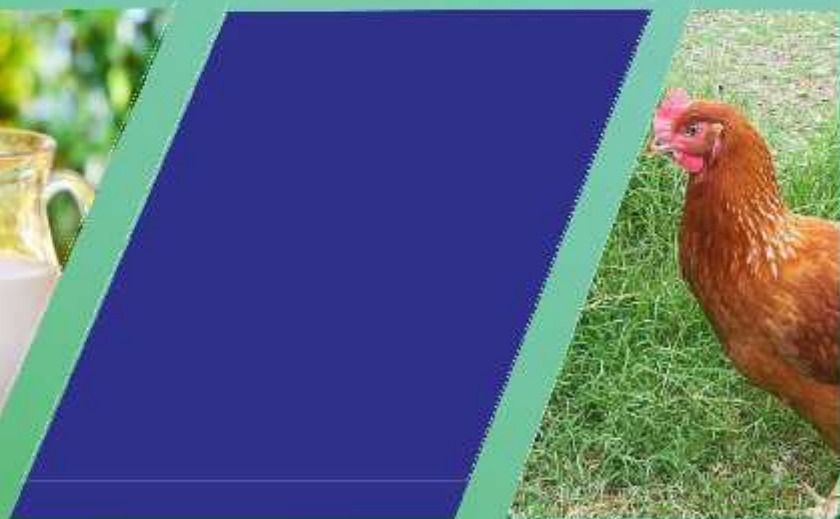
Indikator Kinerja :
Tujuan

No	Indikator	Definisi	Kondisi awal (2013)	Kondisi akhir (2019)
1	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok		39 kelompok	97 kelompok

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUNAN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2014 (transisi) Target	2015 Target	2016 Target	2017 Target	2018 Target	2019 Target		
1.	meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	<p>Kelas kelompok tani sub bidang usaha peternakan terdiri dari pemula, lanjut, madya, dan utama. Kelompok yang mengalami peningkatan dihitung dari kelompok binaan Provinsi yang meningkat ke kelas madya atau utama.</p>	39 kelompok	39	57	65	74	85	97	1. Program peningkatan kapasitas non aparaturnya peternakan	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

**RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
					2017	
1	2	3	3	4	6	7
1.	Meningkatkan produksi peternakan.	1) Meningkatnya produksi peternakan	(1) Produksi daging Produksi telur Produksi susu	386.990 379.984 454.492	437.113 512.528 507.780	112,95% 134,88% 111,72%
2.	Meningkatkan nilai tambah produk peternakan.	1) Meningkatnya nilai tambah produk peternakan	(1) Rasio nilai tambah produk peternakan	26%	30%	115,38%
3.	Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.	1) meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak	(1) Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	74	74	100,00%



**DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Jend A Yani 202 Telp. (031) 8292545-8280445-8285126

Fax. 8291853 - 8287165, email : dinask@jatimprov.go.id

Surabaya